



DAMPAK LARANGAN ILLEGAL LOGGING DAN ILLEGAL MINING TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DAERAH PEMEKARAN

Suwarno 

Universitas Palangkaraya, Indonesia

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Received : 2012; Accepted: 2012; Published: September 2012

Abstract

The aim of this research is for knowing the economic impacts of the policy of illegal logging and Illegal Mining ban to the economic society. The method chosen for exploring this study is qualitative method. The research was conducted from January up to August in 2009. The subject is the community of expansion area, Tumbang Samba. Based on this research, it can be concluded that the impact of issuing a policy of illegal logging and Illegal Mining ban is that a decline of income levels occurs, a lot of sawyers become unemployed, furniture and sawmill companies go bankrupt, the society has no longer become illegal gold miners, the illegal gold mining companies are closed and there are not any immigrants who want to find gold.

Keywords: illegal logging, illegal mining, community economy

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai mengetahui dampak ekonomi kebijakan larangan illegal logging dan Illegal Mining terhadap ekonomi masyarakat. Metode yang dipilih untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Agustus 2009. Subyek penelitian adalah masyarakat daerah pemekaran Tumbang Samba. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dampak kebijakan larangan illegal logging dan Illegal Mining terhadap ekonomi masyarakat yaitu menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, banyak sekali tenaga penganggari menjadi menganggur, perusahaan pengergajian tutup, pekerja industri mebelair tutup, masyarakat tidak lagi menjadi buruh tambang emas ilegal, perusahaan tambang emas ilegal tutup dan tidak ada lagi masyarakat pendatang yang ingin mencari emas.

Kata Kunci: illegal logging, illegal mining, ekonomi masyarakat

How to Cite: Suwarno. (2012). Dampak Larangan Illegal Logging Dan Illegal Mining Terhadap Pendapatan Masyarakat Daerah Pemekaran. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 5 (2): 127-229 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596

© 2012 Semarang State University. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini, secara global penebangan hutan menyumbang hampir 20 % dari emisi karbondioksida ke atmosfer dan mendesak untuk dilakukan penanganan untuk mengurangi penebangan hutan (Olofsson et al, 2010). Di setiap tahunnya secara global, produk hasil hutan senilai US\$ 23 miliar diperoleh secara ilegal (Curtin, 2007).

Dahulu, sebelum ada kebijakan larangan illegal logging dan illegal mining, masyarakat mengatakan, kehidupan kami sangat nyaman (sejahtera) baik secara sosial ekonomi dan budaya, bagaimana tidak, ikan di sungai berlimpah, kayu berlimpah (kami bisa memilih dan menebang kayu dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan kami, tanpa harus berurusan dengan pihak berwajib, kami tinggal bilang saja sama HPH setempat bahwa kami memerlukan kayu untuk keperluan tertentu, dan HPH memberikannya), dan di musim kemarau kami bisa mengambil emas dengan cara menambang secara tradisional di ladang ataupun di sungai yang kami perkirakan terdapat emasnya, tanpa harus berurusan dengan pihak yang berwajib.

Kondisi lahan pertanian cukup subur, sebab apa yang kami tanam dapat tumbuh subur dan menghasilkan, sehingga kami tidak kekurangan bahan makan, kebun karet kami punya cukup untuk mendukung kehidupan kami sehari-hari. Sementara itu, putra dan putri kami sekolah, mengaji dan membantu kami para orang tua dengan baik. Keeratan atau kekerabatan kami terjalin dengan harmonis dengan saling bersilaturahmi.

Keberadaan orang tua, tokoh agama, tokoh adat dan atau tokoh masyarakat dijunjung tinggi, dihormati dan dipatuhi. Apa yang menjadi keputusan dari para tokoh masyarakat dipatuhi. Hal inilah yang kemudian menjadi tonggak penting dan pilar utama yang sangat menentukan bagi masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba Kabupaten Katingan

Kini, terjadi fenomena sebaliknya. Pemutusan hubungan kerja sebagai dampak

larangan usaha kayu, dan tambang yang selama ini menjadi pekerjaan masyarakat di Tumbang Samba dan sekitarnya. Sepinya jasa transportasi sungai, sepi orang yang berbelanja ke pasar Tumbang Samba, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya penghasilan keluarga dan bertambahnya pengangguran merupakan kondisi saat ini di Tumbang Samba dan sekitarnya.

Dalam menghadapi fenomena yang berubah, tindakan adaptasi terhadap fenomena dengan cara mencari jalan keluar sebagai bentuk upaya penyelesaian problema hidup yang dihadapi. Di dalam kondisi yang serba tidak menentu tersebut, transportasi jalan raya dan sektor pertanian sebagai wahana bagi terbukanya berbagai lapangan kerja baru, di sektor jasa transportasi yang kemudian diikuti dengan usaha perdagangan. Dengan adanya jalan raya dan pertanian inilah awal berbagai perubahan pekerjaan, khususnya perubahan jasa transportasi sungai ke jalan raya, yang kemudian berkembang ke pertanian.

Proses perubahan sosial tersebut terus berlangsung karena hal tersebut merupakan dinamika dari kehidupan manusia dalam rangka mencari dan mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pemerintah bekerja sama dengan para tokoh masyarakat memiliki peran tidak kecil untuk turut serta menciptakan kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah arus globalisasi ini.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan gambaran mengenai masyarakat Bakumpai yang tinggal dan hidup di Tumbang Samba kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan yang merupakan setting lokasi dari penelitian ini. Kajian ini dilakukan dengan mendasarkan pada pembangunan di segala bidang yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik pembangunan fisik maupun sosial budaya, ekonomi, politik yang berjalan begitu cepat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, khususnya masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba Kabupaten Katingan.

Masyarakat yang semula hidupnya tergantung dari sungai, misalnya mencari ikan, perikanan sungai (sistem keramba), jasa angkutan sungai dan berdagang di tepi sungai dan pertanian dengan sistem ladang berpindah, ladang menetap yang masih kental dengan budaya tradisional dengan kehidupan yang berorientasi sosial, pengerjaan pertanian dengan sistem handep, yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan, dan secara perlahan tapi pasti mengalami perubahan, sebagai akibat lain dari pembangunan.

Persepsi yang baik tentang perubahan pekerjaan, perubahan pola hidup, perkembangan teknologi diyakini sebagai langkah awal bagi terjadinya perubahan sosial. Begitu juga, pembangunan infrastruktur, illegal logging, dan illegal mining, yang disertai dengan perubahan orientasi hidup, longgarnya ikatan tradisi, dan tidak terikatnya dengan suatu pekerjaan tertentu telah mampu memotivasi masyarakat melakukan perubahan sosial.

Pada satu sisi, adopsi teknologi secara arif dapat dijadikan sebagai media bagi terjadinya perubahan tindakan sosial, perubahan kebiasaan, pola hidup, dan pekerjaan; pada sisi yang lain, adopsi teknologi secara tidak arif akan menjadi pemicu terjadinya pengangguran dan kemunduran sosial. Perubahan sosial yang terjadi merupakan perubahan yang direncanakan pemerintah dengan model perubahan dari budaya sungai ke budaya yang lebih maju.

Rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah dampak kebijakan larangan illegal logging dan Illegal Mining terhadap adopsi teknologi? dan 2) bagaimanakah dampak kebijakan larangan illegal logging dan Illegal Mining terhadap pola hidup masyarakat (sosial-ekonomi) dari perspektif fenomenologi?

Sistem Makna dan Tindakan Manusia

Pembahasan tentang teori budaya tidak bisa lepas dari pembahasan tentang sistem makna dan tindakan manusia. Interasionisme simbolik dan

etnometodologi memprioritaskan pelaku (actor). Sementara itu, neo-Marxisme, fungsionalisme Parsonian dan strukturalisme menekankan kekuatan sistem mana dalam mengendalikan pelaku-pelaku (Herwanto dalam Sutrisno dan Putranto, 2005). Pierre Bourdieu seorang sosiolog Perancis memiliki pengaruh besar dalam teori budaya dan penelitian budaya. Oleh karena itu, Sutrisno dan Putranto (2005), menjelaskan konsep budaya Pierre Bourdieu dalam tulisannya sebagai berikut.

(1) Praktik-praktik sebagai kegiatan reflektif dan reproduktif, baik dalam hal relasi sosial yang obyektif maupun interpretasi-interpretasi subyektif, dan inti dari semua ini adalah ide tentang kebiasaan (habitus). (2) Kebiasaan sebagai sistem yang lebih bertahan lama, disposisi-disposisi yang dapat berubah-ubah, dan struktur-struktur yang menstruktur, yaitu prinsip-prinsip generalisasi dan membentuk praktek-praktek. (3) Kebiasaan menjadi konsep penting dalam mendamaikan ide tentang struktur dengan ide tentang praktek. (4) Konsep kebiasaan sebagai: (a) kecenderungan-kecenderungan empiris untuk bertindak dalam cara-cara yang khusus (gaya hidup); (b) motivasi, preferensi, cita rasa dan perasaan (emosi); (c) perilaku yang mendarah daging; (d) suatu pandangan tentang dunia (kosmologi); (e) keterampilan dan kemampuan sosial praktis; (f) aspirasi dan harapan berkaitan dengan perubahan hidup dan jenjang karier. (5) Kebiasaan tidak berdasarkan alasan (nalar), melainkan lebih berupa keputusan impulsif. (6) Kebiasaan berkaitan dengan ketidaksetaraan sistematis dalam masyarakat berdasarkan kekuasaan dan kelas. (7) Kebiasaan membekali seseorang dengan hasrat, motivasi, pengetahuan, keterampilan, rutinitas, dan strategi yang akan memproduksi status yang lebih rendah (inferior). (8) Keluarga dan sekolah berperan penting dalam membentuk kebiasaan yang berbeda-beda. (9) Aspek yang berbeda-beda tersebut menyatakan bahwa kebiasaan merupakan disposisi yang dapat berubah-ubah berdasarkan situasi yang dihadapi. (10)

Terdapat tiga modal yang berperan dalam masyarakat yang menentukan kekuasaan sosial dan ketidaksetaraan sosial, yaitu modal ekonomis yang menunjukkan sumber ekonomi, modal sosial yang berupa hubungan-hubungan sosial yang memungkinkan seseorang bermobilisasi demi kepentingan sendiri dan modal budaya yang memiliki beberapa dimensi: (a) pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya; (b) cita rasa budaya (*cultural tastes*) dan preferensi; (c) kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas dan ujian-ujian masuk); (d) kemampuan-kemampuan budayawi (*cultural skills*) dan pengetahuan praktis (*savoir faire* atau *now-how* seperti kemampuan memainkan alat musik), serta (e) kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan yang buruk. (11) Modal budaya sebagai dimensi yang lebih luas dari pada kebiasaan (*habitus*) dan sekaligus menunjukkan lingkungan sosial pemilikinya. (2) Modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial. (3) Budaya tinggi diartikan sebagai yang beradab, intelektual, abadi dan serius, sementara itu budaya populer diartikan sebagainya remeh dan tidak bertahan lama.

Sistem nilai budaya terperinci ke dalam norma-norma. Adapun norma adalah tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya pada sebagian besar dari tindakan-tindakan manusia dalam masyarakat. Bentuk norma adalah undang-undang, peraturan, aturan-aturan adat dan aturan kesopanan pergaulan. Sedangkan sikap merupakan kecondongan untuk berkelakuan dengan suatu pola-pola tindakan norma-norma dan pola-pola cara berpikir merupakan unsur-unsur kebudayaan yang saling memengaruhi dalam perilaku manusia.

Sementara itu, Staley dalam Lauer (2003) menjelaskan fungsi pemerintah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) menciptakan landasan fisik dan sosial yang kuat bagi pembangunan, (2) menciptakan rencana pembangunan yang menyeluruh dan terpadu, dan (3) menghasilkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih efisien.

Dalam rangka itu, salah satu proses modernisasi tersebut melalui jalur teknologi, karena teknologi menyebabkan perubahan (Lauer, 2003). Lebih jauh dijelaskan bahwa dengan teknologi akan terjadi (1) Sejumlah besar alternatif atau pilihan, sehingga masyarakat akan mengalami perubahan besar. (2) Teknologi akan merubah pola-pola interaksi. (3) Teknologi akan menciptakan masalah baru.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan teori Perubahan sosial dari Robert H. Lauer untuk mencermati fenomena perubahan pekerjaan, perubahan pola hidup, perkembangan teknologi yang berakibat pada perubahan kebiasaan (pola hidup atau perilaku sehari-hari) dan budaya pada masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba adalah proporsional.

Menurut Spencer dalam Koentjaraningrat (1982), perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia itu telah atau akan melalui tingkat-tingkat evolusi yang sama, dan tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evolusi yang melalui tingkat-tingkat yang berbeda-beda. Sebagian besar negara di dunia pada dekade 1950-1960an masih menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik setelah pengalaman panjang di masa kolonialisme. (Fitriani, 2005).

Slamet dalam Taneko (1993) dalam konsepsinya menjelaskan bahwa kekuatan pendorong (*motivational forces*), kekuatan tersebut terdapat dalam masyarakat dan bersifat mendorong orang-orang untuk berubah. Hal ini senilai dengan kondisi yang penting sekali, oleh karena tanpa adanya kekuatan tersebut orang tidak akan berubah. Kekuatan ini berasal dari segala aspek situasi yang merangsang kemauan untuk melakukan perubahan. Kekuatan ini bersumber dari: (1) ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk situasi yang lain, (2) adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang bisa ada, (3) adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, kemauan menyesuaikan diri, dan (4) kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan

peningkatan, misalnya produktivitas, dan lain-lain.

Rogers (1983) dalam Kusumahadi (1996) mengemukakan penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Apabila seseorang menerima suatu inovasi maka ia mulai menggunakan ide tersebut, dalam kehidupannya dan menggantikan penggunaan ide-ide lama. Keputusan dalam menerima suatu ide baru akan melibatkan individu secara aktif untuk memilih apakah menerima atau menolak yang diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Selanjutnya, individu atau kelompok melakukan konfirmasi atau pemantapan untuk memperkuat keputusan yang telah diambilnya.

Menerima atau menolak suatu inovasi akan melibatkan individu atau kelompok secara aktif untuk memilih. kondisi masyarakat sebelum inovasi diperkenalkan berperan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tahap pengenalan bermula ketika seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang fungsinya. Sumber dan saluran komunikasi memberikan stimulasi terhadap individu/kelompok selama keputusan untuk menerima/menolak tersebut masih dalam proses.

Pada tahap persuasi seseorang akan membentuk persepsinya terhadap inovasi dan hal ini dapat terjadi melalui media massa atau antar pribadi. Seseorang yang telah memutuskan untuk menerima inovasi ada kemungkinan untuk meneruskan ataupun menghentikan penggunaannya. Diskontinu diartikan tidak meneruskan untuk menerima atau mengadopsi, hal ini dapat terjadi karena seseorang atau kelompok masyarakat telah menemukan ide baru yang lain atau kecewa terhadap hasil yang diperoleh.

Svalastoga (1989) menyatakan kecepatan penyebaran inovasi berhubungan dengan status sosial masyarakat pengguna, namun ditemukan lapisan atas lebih cepat menerima suatu inovasi. Dalam hal ini tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat berperan untuk mempercepat proses pene-

rimaan inovasi dalam suatu masyarakat di pedesaan.

Inovasi teknologi transportasi dan peralatan rumah tangga pada dasarnya ditujukan untuk diterima oleh masyarakat Bakumpai agar dapat meningkatkan produktivitas usaha dan pada gilirannya dapat pula meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (Kusumahadi, 1996). Pembangunan dalam bidang infrastruktur telah membuahkan hasil dengan berubahnya transportasi air (sungai) ke jalan raya yang berdampak luas secara sosial, ekonomi dan budaya di daerah tersebut.

Dengan kata lain, inovasi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan, maka dengan demikian memerlukan suatu kondisi yang sesuai agar dapat mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Dikatakan peran individu, struktur sosial, kultural dan fasilitas ataupun sarana berperan dalam proses perubahan. Pada dasarnya, bagaimana dan mengapa masyarakat mengadopsi ataupun menolak suatu inovasi, maka jawabannya kembali pada faktor di atas.

Rogers dan Shoemaker (1971), mengatakan masuk dan menyebarnya inovasi dalam suatu sistem sosial dapat melalui anggota sistem secara individual, kolektif ataupun otoritas penguasa sistem. Lebih lanjut dijelaskan bahwa membuat suatu ilustrasi proses adopsi inovasi oleh individu petani sebagai berikut. (1) Periode pengenalan: masyarakat berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun penguasa (changes agent). (2) Periode persuasi: masyarakat mengadakan komunikasi dengan tetangganya dan mengadakan percobaan. (3) Periode keputusan: menggunakan inovasi dalam pekerjaannya (pertanian, perkebunan, perikanan air tawar atau keramba, dan sektor jasa transportasi dan jasa lain serta perdagangan). (4) Periode pengukuhan: masyarakat memantapkan penggunaan ide baru atau tidak meneruskan ide baru.

Slamet (1978), menyatakan proses adopsi sangat dipengaruhi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, karena

mereka berperan sebagai pengubah perilaku petani melalui proses komunikasi yang efektif. Ini berarti kecepatan arus perubahan sosial menurut Slamet sangat ditentukan oleh aktivasi dari petugas PPL, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Semakin aktif atau semakin berperan ke tiga tokoh tersebut semakin cepat pula perubahan tersebut terjadi, dan demikian sebaliknya. Namun Rogers (1983), menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi diadopsinya suatu inovasi sangat tergantung pada karakteristik individu, norma, nilai-nilai dan persepsi masyarakat terhadap inovasi tersebut. Menyetujui atau tidak untuk mengadopsi suatu inovasi menurut Rogers dan Shoemaker (1971) dipengaruhi oleh: (1) keputusan otoritas, yaitu keputusan yang dipaksakan kepada seseorang oleh individu yang berada dalam posisi atas, (2) keputusan opsional, yaitu keputusan yang dibuat oleh individu dan terlepas dari pengaruh keputusan anggota sistem, dan (3) keputusan kolektif, keputusan bersama yang dibuat oleh anggota kelompok yang ada dalam sistem sosial melalui konsensus.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam hal adopsi teknologi dan atau adopsi untuk berinovasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu keputusan otorita, keputusan opsional, dan keputusan kolektif. Keputusan otorita, berarti adopsi teknologi atau adopsi untuk berinovasi terjadi atau dilakukan karena keputusan atau kebijakan dari pemerintah di atas atau yang lebih tinggi. Adopsi seperti ini banyak terjadi karena kebijakan pemerintah, seperti adanya pembangunan jalan, pembangunan industri dan pelabuhan atau kebijakan pembangunan. Hal yang seperti ini masyarakat siap tidak siap, mau tidak mau dipaksa untuk melakukan adopsi guna memenuhi tuntutan pemerintah.

Adapun adopsi yang lebih disebabkan oleh adanya keputusan opsional adalah adopsi sebagai solusi dari suatu permasalahan. Hal seperti terjadi bukan karena keputusan pemerintah, melainkan kemauan masyarakat melalui rapat dari berbagai tokoh dalam masyarakat untuk mencari solusi dalam mengatasi

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya dengan lahirnya kebijakan illegal logging dan illegal mining, maka masyarakat pengguna transportasi air terkena dampak, karena volume pengguna transportasi dari industri hasil hutan (kayu) semakin berkurang demikian juga dengan tambang tanpa ijin. Akibatnya masyarakat berusaha untuk mengadopsi teknologi di darat yaitu transportasi (travel).

Illegal Logging

Illegal logging berpengaruh terhadap fungsi-fungsi penting hutan (Bala et al, 2007). Nurkhin (2005) berpendapat bahwa akibat dari illegal logging tidak hanya mengancam pelestarian hutan produksi tetapi yang lebih memprihatinkan adalah terjadinya kerusakan pada hutan-hutan yang mempunyai fungsi lindung. Masalahnya lagi adalah deteksi pembalakan liar oleh pemerintah tidak sempurna atau berjalan kurang baik ditambah dengan biaya deteksinya yang mahal (Amacher et al, 2007).

Masalah seperti Kerusakan hutan memberikan konsekuensi yang luas terhadap sumberdaya air, produktivitas pertanian, dan membawa ancaman terhadap lingkungan hidup yang tidak terbatas pada wilayah administratif dimana hutan tersebut berada (Nurkhin, 2005). Selain itu semakin menyusutnya luasan hutan kita menyebabkan kelebihan air (banjir dan longsor) pada waktu hujan dan kurang air pada waktu kemarau (Handayani, 2006). Namun, organisasi non-pemerintah (LSM) dan pemerintah cenderung berbeda dalam penilaian mereka tentang apa yang merupakan illegal logging, dengan penilaian yang sering berasal dari bukti penelitian masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah kualitatif, khususnya perspektif fenomenologi. Penelitian dilakukan secara mandiri pada bulan Januari--Agustus 2009. Subyek yang menjadi informan penelitian ini

adalah masyarakat desa Samba Katung, Samba Kahayan, Samba Bakumpai, dan Samba Danum. Pengamatan partisipasi dan wawancara secara terarah dipilih untuk mengumpulkan data penelitian. Untuk menjaga keakuratan data dilakukan triangulasi data yang meliputi cek, recek, dan kroscek. Data yang sudah terkumpul dianalisis melalui proses obyektifikasi, internasionalisasi, dan eksternalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi Lokasi Penelitian

Kecamatan Katingan Tengah terdiri dari 15 desa, dan 4 desa merupakan daerah penelitian dan berada di daerah Tumbang Samba yang meliputi desa Samba Katung, Samba Kahayan, Samba Bakumpai, dan Samba Danum, dan keempat desa tersebut terletak di daerah Tumbang Samba. Desa Samba Danum merupakan ibu kota kecamatan Katingan Tengah. Keempat desa tersebut terdapat di daerah Tumbang Samba. Klasifikasi wilayah administrasi desa-desa di Tumbang Samba tergolong desa swakarya, sementara desa-desa lain di kecamatan Katingan Tengah masih berstatus desa swadaya. Kondisi ini mencerminkan bahwa ke empat desa tersebut lebih maju dan lebih mandiri jika dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Katingan Tengah.

Dewasa ini, daerah Tumbang Samba dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Dayak Ngaju, suku Dayak, Katingan, suku Banjar, sebagian kecil Jawa, dan suku Dayak Bakumpai. Sebagian besar penduduk yang tinggal di empat desa (desa Samba Katung dan Samba Bakumpai lebih dari 97% penduduknya adalah suku Dayak Bakumpai) dan di desa Samba Danum dan desa Samba Kahayan memiliki penduduk yang multi suku dan kultur, sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, daerah Tumbang Samba sebagian besar di huni oleh suku Dayak Bakumpai. Itu berarti manakala orang menyebut daerah Tumbang Samba maka identitas Bakumpai akan menonjol di daerah tersebut. Meskipun budaya asli suku Dayak Bakumpai secara lambat namun pasti dan didorong oleh arus globalisasi mulai

memudar (cultur loss), apalagi tidak ada generasi yang berusaha melestarikannya.

Letak geografis dari Tumbang Samba yang strategis, yaitu di pertemuan dua muara sungai besar di Kabupaten Katingan (sungai Samba dan sungai Katingan) menyebabkan daerah sungai menjadi daerah segitiga emas di jamannya (sebelum kebijakan tentang larangan illegal logging dan Illegal Mining diterapkan oleh pemerintah). Hal tersebut disebabkan oleh daerah Tumbang Samba merupakan pertemuan para pedagang kayu dan emas sebagai hasil dari illegal logging dan Illegal Mining tersebut.

Di daerah Tumbang Samba banyak dijumpai losmen atau penginapan-penginapan. Ditunjang lagi transportasi darat yang belum ada waktu itu, sehingga transportasi air merupakan satu-satunya alat transportasi utama. Akibatnya, penduduk Tumbang Samba banyak yang bekerja di sektor ekonomi (perdagangan), jasa penginapan, jasa transportasi, di samping pekerjaan pokok mereka yaitu bertani atau berladang serta berkebun karet.

Kondisi masyarakat yang berdomisili di Tumbang Samba pada umumnya dan suku Bakumpai khususnya memiliki kehidupan yang cukup sejahtera dan sebagian besar bekerja di sektor perdagangan, di samping suku Banjar, dan sebagian kecil suku Jawa. Kemapanan dalam hidup tersebutlah yang mendorong dan putra-putra mereka banyak yang belajar atau sekolah di luar Tumbang Samba, mulai dari SMA sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, sudah sejak dulu banyak di antara mereka yang sukses dalam hidupnya di ibu kota provinsi yaitu Palangkaraya) maupun di Jakarta.

Menyebut nama Tumbang Samba terbayang kehidupan daerah di pedalaman namun penduduknya memiliki kehidupan ekonomi yang cukup mapan dengan mata pencaharian yang bervariasi, mulai dari sektor jasa, perdagangan, maupun pertanian atau perkebunan, dan sebagian kecil yang bekerja di sektor nelayan atau memelihara ikan di keramba. Tumbang Samba merupakan pusat perdagangan bagi daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, di daerah tersebut kehidupan perdagangan

cukup ramai.

Di sisi lain, Tumbang Samba, khususnya desa Samba Danum yang merupakan ibu kota Kecamatan Katingan Tengah sudah barang tentu didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai, seperti listrik, sarana komunikasi seluler (Hp) sudah lama berkembang di daerah tersebut. Hal tersebut sebagai perangat utama kesuksesan berbagai usaha di daerah Tumbang Samba. Oleh karena itu, arus globalisasi berkembang sangat pesat di daerah tersebut. Hampir tidak ada lagi penduduk di Tumbang Samba yang tidak memiliki HP dengan berbagai kartu (telkomsel maupun indosat).

Kondisi Tumbang Samba yang strategis itulah yang mendorong pertumbuhan penduduk di daerah tersebut cukup tinggi jika tidak dibilang dengan ledakan penduduk. Sebab berdasarkan data statistik pertumbuhan penduduk di Kecamatan Katingan Tengah adalah >3%/tahun. Khususnya desa Samba Danum yang luasnya 4,5 km² dengan kepadatan penduduk 87,73/km². Ini dapat diartikan bahwa penduduk terkonsentrasi di desa saja, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3,11 %. Hal ini didasarkan fakta sosial bahwa desa Samba Danum merupakan ibu kota kecamatan, pusat perdagangan, pusat pasar (pusat ekonomi), pusat perkantoran dan jasa.

Desa Samba Bakumpai dengan luas 2,3 Km² dan tingkat kepadatan penduduk 71,35 /Km². Sama halnya dengan desa Samba Danum, penduduk desa Samba Bakumpai juga terkonsentrasi di desa tersebut, tidak terpencair, tingkat pertumbuhan penduduknya 3,08%/tahun, sehingga kondisi penduduk di desa tersebut cukup padat. Desa Samba Katung dengan luas 5,5 Km², dengan tingkat kepadatan penduduknya 38,16/Km² dan tingkat pertumbuhan penduduknya 3,08%/tahun, serta tingkat kepadatan penduduk di desa Samba Kahayan adalah 145,35/ Km², dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,69%/tahun.

Adopsi Teknologi oleh Untuk Kemajuan Ekonomi Masyarakat

Berbagai kemajuan yang dialami diberbagai hal, baik itu dibidang kesehatan, arsitek, transportasi, komunikasi dan berbagai kemajuan lain, serta berbagai keuntungan yang diperoleh manusia berkat kehadiran teknologi, walaupun kehadiran teknologi tersebut terkadang menimbulkan gesekan dengan nilai-nilai tradisi di masyarakat.

Bagi masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba penggunaan teknologi disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat yang berlaku. Oleh arena itu, dalam penggunaan teknologi atau pengadopsian suatu teknologi dalam kegiatan sehari-hari ada filter, tidak diterima begitu saja. Adapun filternya adalah norma-norma atau nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba itu sendiri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memegang peranan yang sangat menentukan dalam hal pengadopsian tersebut.

Masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba selama ini selalu menerima setiap perkembangan teknologi. Hal ini cukup disadari karena masyarakat Bakumpai merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas. Di samping itu, tidak ada gunanya menolak kehadiran teknologi. Sebab, dengan tidak menerima kehadiran teknologi, maka kehidupan bermasyarakat mengalami kemunduran dan tertinggal dengan suku dan bangsa lain.

Persepsi masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba tentang perkembangan teknologi, dapat dimaknai sebagai: (1) sikap keterbukaan dari masyarakat terhadap dunia teknologi; (2) salah satu sikap modernitas atau pembaharuan dari masyarakat; (3) sikap terbuka untuk siap menerima budaya dari luar; (4) kesadaran atas keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas (globalisasi). Hal demikian diwujudkan dalam bentuk perilaku masyarakat sehari-hari dan adanya rasa ketergantungan terhadap teknologi. Ketergantungan terhadap teknologi tersebut memengaruhi daya pikir dan perilaku, misalnya melakukan pekerjaan menjadi terasa berat, dan tidak

mau melakukan suatu pekerjaan, jika tanpa bantuan teknologi. Kesadaran tentang pentingnya teknologi sudah berlangsung lama, seiring dengan perkembangan budaya yang dimiliki masyarakat Bakumpai itu sendiri. Hal tersebut tampak jelas dari proses adopsi teknologi, khususnya adopsi teknologi di sarana transportasi sungai, yang tampak jelas mulai dari jukung, kemudian diberi atau dipasang mesin motor yang ditempelkan (yang bisa dilepas) sehingga menjadi motor tempel, klotok yang dipasang mesin mobil atau truk, sehingga jalannya lebih cepat berikut seterusnya.

Kemudian, menyusul infrastruktur sudah dapat dimanfaatkan, sehingga banyak transportasi beralih dari sungai ke jalan darat, sehingga transportasi saungai menjadi sepi dan mati. Masyarakat yang semula berusaha dan bekerja di sungai beralih ke darat, yang dulu sopir speed boad beralih ke sopir travel, truk, bis. Hal tersebut sudah barang tentu melalui adopsi teknologi dan adopsi ekonomi/usaha. Sebagaimana tahapan dalam beradopsi.

Perubahan Ekonomi Masyarakat

Hidup adalah dinamis, dan dinamis itu adalah perubahan dan perubahan itu adalah kehidupan. Memang orang yang hidup sudah tentu melakukan pergerakan, karena pergerakan itu merupakan indikator suatu kehidupan. “Kalau tidak mau berbubah jangan hidup”. Itu nasehat yang diberikan oleh salah seorang tokoh di daerah penelitian kepada peneliti, pada saat melakukan observasi awal. Adapun pola hidup adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga membentuk pola.

Perubahan pola hidup pasti terjadi sesuai dengan perkembangan masa, situasi, kondisi dan situasi, dan ini semua terkait dengan motivasi untuk tetap hidup (mempertahankan kehidupan). Perubahan pola hidup juga sebagai upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang mungkin sudah berubah. Karena lingkungan sekitar yang sudah berubah, baik itu lingkungan fisik maupun

sosial, maka manusia yang ada di sekitarnya mau atau tidak mau, siap atau tidak siap melakukan tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi perubahan, demikian dan perubahan terjadi di mana-mana, demikian juga dengan masyarakat Bakumpai. Karena hidup selalu berubah dari waktu ke waktu, tidak ada yang kekal atau abadi kehidupan di dunia. Terdapat prinsip yang dipegang oleh masyarakat Bakumpai tentang perubahan, yaitu “hari ini lebih baik dari pada hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini, dan jika hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang gagal (rugi).” Dalam hidup jangan takut terhadap perubahan, kalau memang dengan perubahan tersebut kehidupan menjadi lebih sejahtera, dan bahagia, sepanjang perubahan tersebut menjadi lebih baik dan sejahtera. Merubah pekerjaan atau beralih pekerjaan dilakukan jika pekerjaan yang lama dirasakan tidak membawa perubahan atau keuntungan maupun kesejahteraan. Dorongan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan keluarga, motivasi, keyakinan untuk berhasil memegang peranan penting dalam proses perubahan.

Kebijakan pemerintah tentang larangan illegal logging dan Illegal Mining sudah menjadi program pemerintah, karena penebangan kayu dan tambang tanpa ijin jika dibiarkan dapat menimbulkan kerus alam dan kelestarian lingkungan serta dapat menimbulkan bencana banjir. Selain itu, kebijakan terkait yang dengan kehutanan harus juga mendorong upaya pengentasan kemiskinan (Larson dan Ribot, 2007).

Perpindahan pekerjaan tersebut mempunyai konsekuensi pada perubahan pola hidup. Untuk itu diperlukan kemampuan adaptasi terhadap sesuatu yang baru. Semula hidup di lanting dengan kebiasaan-kebiasaan hidup di sungai, seperti mandi, mencuci, makan cukup tidak di meja makan, makan memakai tangan kemudian pindah ke daratan, makan menggunakan sendok, mandi di kamar mandi, bersepeda motor, naik mobil, serta

kebiasaan-kebiasaan lain.

Perubahan pekerjaan tergantung pada diri manusia masing-masing, karena tidak ada yang merubah, kecuali dirinya sendiri. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keinginan untuk merubah pekerjaan, namun secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyebab yang berasal dari dalam diri dan penyebab yang berasal dari luar. Penyebab yang berasal dari dalam, misalnya kebutuhan untuk dapat hidup layak (sejahtera).

Adapun penyebab yang berasal dari luar, misalnya menurunnya penumpang angkutan sungai, menurunnya angkutan barang melalui sungai, pemutusan hubungan kerja, menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari tutupnya berbagai perusahaan yang terkait dengan bahan pokok kayu, hal ini karena sulitnya diperoleh kayu sebagai bahan pokoknya, demikian juga dengan perusahaan tambang tanpa ijin sebagai akibat lebih lanjut dari kebijakan pemerintah tentang illegal logging dan illegal mining. Perubahan fenomena tersebut di atas, memotivasi masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba untuk memberikan persepsi tentang perubahan pekerjaan.

Hasil pembangunan yang sudah dapat dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat Tumbang Samba, khususnya pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebijakan pemerintah tentang larangan usaha kayu tanpa ijin dan larangan usaha tambang tanpa ijin, telah menimbulkan berbagai perubahan di masyarakat, salah satunya adalah perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaan tersebut juga menimbulkan berbagai perubahan sosial masyarakat. Berbagai temuan yang dihasilkan yang berkaitan dengan perubahan pola hidup adalah sebagai berikut.

Pemutusan hubungan kerja sebagai dampak larangan usaha kayu, dan tambang yang selama ini menjadi pekerjaan masyarakat di Tumbang Samba dan sekitarnya. Akibat lebih luas dari hal tersebut adalah sepiunya jasa transportasi sungai, sepiunya orang yang berbelanja ke pasar Tumbang Samba, menurunnya daya

beli masyarakat, menurunnya penghasilan keluarga dan bertambahnya pengangguran, dengan kata lain kondisi di Tumbang Samba dan sekitarnya terjadi chaos.

Dalam menghadapi fenomena yang sudah berubah, maka tindakan adaptasi terhadap fenomena yang berubah dan sambil mencari jalan keluar merupakan bentuk upaya penyelesaian problema hidup yang dihadapi masyarakat. Di dalam kondisi yang serba tidak menentu tersebut, transportasi jalan raya dan sektor pertanian sebagai titik awal terbukanya berbagai lapangan kerja baru, di sektor jasa transportasi yang kemudian diikuti dengan usaha perdagangan. Dari jalan raya dan pertanian inilah awal berbagai perubahan pekerjaan, khususnya perubahan jasa transportasi sungai ke jalan raya, yang kemudian berkembang ke pertanian.

Perubahan berbagai pekerjaan seperti dijelaskan tersebut di atas, tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu pengamatan dan penilaian terhadap perubahan fenomena yang terjadi, yang kemudian disusul dengan usaha dan kerja keras masyarakat yang didasari oleh keyakinan dan motivasi tinggi untuk berhasil dan tidak tenggelam dan terlindas oleh arus perubahan yang sedang berlangsung. Sikap masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba tersebut sebagai perwujudan dari kemampuan adaptasi masyarakat menghadapi berbagai perubahan yang sedang dan terus berlangsung.

Perubahan pola hidup dilakukan apabila perubahan pola hidup tersebut diyakini dan dipercayai mengandung nilai-nilai positif untuk kehidupan keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh arena itu, jika perubahan tersebut hanya mengandung nilai-nilai yang dapat menyengsarakan keluarga dan masyarakat, maka perubahan pola hidup tidak perlu dilakukan.

Perubahan pola hidup diawali dengan adanya perubahan jenis pekerjaan. Karena setiap pekerjaan memiliki nilai-nilai, dan manusia tersebut mau tidak mau jika ingin bekerja menyesuaikan dengan jenis

pekerjaan yang dilakukannya. Sikap adaptasi dengan nilai-nilai baru yang terkandung di dalam lingkungan pekerjaan baru tersebut mau tidak mau terbawa di dalam lingkungan keluarga, dan tercipta kebiasaan baru dalam keluarga, kebiasaan baru atau perilaku baru tersebut menjadi pola perilaku yang terbawa dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya.

Akibat kemajuan teknologi masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba secara lambat tetapi pasti berpengaruh pada mulai longgarnya pelaksanaan berbagai kegiatan tradisi, misalnya berbagai acara ritual yang berkaitan dengan proses pertumbuhan bayi, berbagai selamatan yang berkaitan dengan pendirian rumah, berbagai upacara ritual yang berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan maupun perdagangan.

Namun, sebagian orang-orang tua di kalangan masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba berusaha keras untuk tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi yang ada, karena hal tersebut dipandang sebagai warisan sosial dari leluhur. Oleh karena itu, perubahan pola hidup di masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba tetap berupaya keras tidak sampai menghilangkan nilai-nilai tradisi, walaupun kenyataan sosial nilai-nilai tradisi tersebut semakin longgar. Sebab, disadari ataupun tidak, mau ataupun tidak mau, hal tersebut memiliki resiko yaitu terjadinya perubahan nilai-nilai budaya mereka. Pergeseran ataupun perubahan nilai-nilai sosial dan budaya sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum lancarnya transportasi darat, dan kebijakan tentang larangan illegal logging dan illegal mining. Namun, semenjak masyarakat dapat menikmati layar televisi, sehingga berbagai budaya dan nilai-nilai sosial dari luar masuk ke masyarakat melalui tontonan atau siaran televisi, apalagi pada saat itu mencari nafkah sangat mudah.

Sudah disadari oleh masyarakat, bahwa dengan melakukan adaptasi terhadap fenomena yang ada (yang sudah berubah) dengan melakukan adopsi teknologi (inovasi) dalam rangka upaya untuk dapat bekerja pada pekerjaan baru yang banyak tersedia di daratan baik itu bidang pertanian,

perkebunan, jasa transportasi dan perikanan air tawar (sungai) dan pekerjaan lain. Dengan demikian masyarakat sudah siap mengalami perubahan pola hidup. Dalam suasana seperti ini maka peranan motivasi sangat penting, dan motivasi tersebut diperoleh dari keinginan, niat dan kemauan yang kuat untuk berubah. Oleh karena itu, fungsi persepsi bagi masyarakat adalah sebagai pemberi motivasi dan keyakinan bahwa perubahan pola hidup yang dilakukan tidak sia-sia, dan kehidupan hari esok lebih baik dari sebelumnya. Jika tidak demikian maka terlindas oleh perubahan dan berada dalam ketidakmampuan secara berkepanjangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, dampak kebijakan larangan illegal logging dan Illegal Mining terhadap ekonomi masyarakat yaitu menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, banyak sekali tenaga penganggari menjadi menganggur, perusahaan pengergajian tutup, pekerja industri mebelair tutup, masyarakat tidak lagi menjadi buruh tambang emas ilegal, perusahaan tambang emas ilegal tutup dan tidak ada lagi masyarakat pendatang yang ingin mencari emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amacher, Gregory S. et al. (2007). Royalti Reform and Illegal Reporting of Harvest Volumes Under Alternative Penalty Schemes. *Environmental and Resource Economics* Vol 38 Issue 2 pp 189-211.
- Bala. et al. (2007). Combined Climate and Carbon-cycle Effect of Large-scale Deforestation. *Proceedings of The National Academy of Sciences* 104 (16) : 6550-6555.
- Berger, L. Peter., & Thomas Luckmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (terjemahan). Jakarta : LP3ES.
- Curtin, T. (2007). What Constitutes illegal logging?. *Pacific Economic Bulletin*. Vol. 22 (1) March 2007.
- Farley, Reynolds. (1984). *Blacks and White: Narrowing the Gap?*. Harvard University Press: Cambridge, Mass.
- Fitriani, Fitria., Bert Hofman., & Kai Kaser. (2005).

- Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41(1): 57-79.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. (2006). Krisis Air, Illegal logging Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Yustisia* edisi nomor 69 September-Desember 2006 hlm 44-50.
- Henslin, M. James. (2005). *Sociology. A Down-To-Earth Approach*. Boston-USA : The Book Company.
- Ida, Laode. (2005). *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta : Media Indonesia
- Koentjaraningrat. (1982). *Seri Teori-teori Antropologi-Sosial, Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : UI Press.
- Kusumahadi, Didik. (1996). *Disertasi: Usaha sapi perah oleh Masyarakat Petani Hortikultura di Wilayah Batu, Suatu studi tentang Konsekuensi sosial, dalam Adopsi dan Difusi Teknologi Pertanian, Konstruksi Ilmu-ilmu Sosial*. Surabaya : Unesa University Press.
- Lahajir. (2002). *ETNOEKOLOGI Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang*. Yogyakarta : Galang Press.
- Larson, Anne M., and Jesse C. Ribot (2007). *The Poverty of Forestry Policy : Double Standards on An Uneven Playing Field*. *Sustainability Science*. Vol. 2 pp 189-204.
- Lauer, H. Robert. (2003). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurkhin, Baharuddin. (2005). *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Perennial*. Vol 2 (1) hlm 25-30.
- Olofsson, Pontus. et al. (2010). *Implications of Land Use Change on The National Terrestrial Carbon Budget of Georgia*. *Carbon Balance and Management* Vol 5 (4).
- Poerwanto, Hari. (2000). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Redcliffe-Brown, Alfred Reginald. (1922). *The Andaman Islanders*, New York : The Free Press.
- Ritzer, George. (1985). *Sociological Theory*, Second edition. New York: Knopf.
- Slamet, M. (1978). *Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian*. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Soekanto, Soerjono. (1999). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Stark, Werner., & Herbert Spencer. (1963). *The Fundamental Forms of Social Thought*, Fordham University Press.
- Sutrisno, Muji & Hendar Putranto. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan, Budaya, Struktur, dan Pelaku*. Yogyakarta : Kanisius.
- Svalastoga, Kaare . (1989). *Social Differentiation* . Seattle: University of Washington
- Sztompka, Piotr. (2005). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada.
- Taneko, Soleman B. (1993). *Struktur dan Proses Sosial, Suatu pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thoha, Miftah. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.